

**LAPORAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN
PUBLIK PESERTA CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX
(CGPI)**

OLEH:

**Dra. Hariyati, Ak., M.Si.
Lintang Venusita, S.E., Ak., M.Si.**

**NIP. 196510011997022001
NIP. 197705132008122001**

**Dilaksanakan dengan Dana DP2M
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya
Nomor: 081/UN38/HK/LT/2013 tanggal 7 Februari 2013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Publik Peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Dra .HARIYATI., Ak., M.Si
NIDN : 0001106510
Jabatan Fungsional : Lektor kepala
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 0818509796
Surel (e-mail) : aaan_har@yahoo.com
Institusi Mitra (jika ada) :-
Nama Institusi Mitra :-
Alamat :-
Penanggung Jawab :-
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana tahun 2
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 40.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 80.000.000,00



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Bambang Suratman, M.Pd.
NIP. 195012121978021001

Surabaya, 13-12-2013
Ketua Peneliti,

Dra.Hariyati., Ak., M.Si.
NIP. 196510011997022001



Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Ir. I Wayan Susila, MT.
NIP. 195312151980021002

RINGKASAN

Didalam pengukuran praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian tersebut secara tidak langsung menunjukkan kegunaan (*usefulness*) dari pemeringkatan praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia). Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terkait dengan daya saing perusahaan di Indonesia tergolong masih rendah, hal ini sesuai laporan tahunan peringkat daya saing sejumlah negara di dunia yang dikeluarkan *The International Institute for Management Development* (IIMD), Laussane, Swiss tanggal 26 April 2001 menyatakan Indonesia berada dalam posisi terendah dari 49 negara yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada perseroan terbuka peserta CGPI (*Corporate Governance Perception Index*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan regresi untuk uji hipotesis.

Hasil sementara yang dilaporkan dalam laporan kemajuan ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, mempunyai arah hubungan positif. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, mempunyai arah hubungan positif.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmad dan hidayahNya maka penelitian ini dapat dilaksanakan. Penelitian fundamental ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan perseroan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang terkait dengan perkembangan akuntansi positif (*positive accounting theory*) khususnya mengenai, *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan.

Penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Surabaya, 3 Desember 2013

Ketua Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penelitian
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3 Urgensi Penelitian

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Landasan Teori
 - 2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)
 - 2.1.2 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)
 - 2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 2.1.3.1 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
 - 2.1.3.2 Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
 - 2.1.4. Ukuran Perusahaan
 - 2.1.5 *Good Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan
 - 2.1.7 Hubungan Ukuran Perusahaan dan Kinerja Perusahaan
- 2.2 Hipotesis

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- 3.1 Tujuan Studi
- 3.2.1 Manfaat Teoritis
- 3.2.2 Manfaat Praktis

BAB 4 METODE PENELITIAN

- 4.1 Rancangan Penelitian
- 4.2 Populasi
- 4.3 Jenis dan Sumber Data
- 4.4 Variabel Penelitian
 - 4.4.1 Klasifikasi Variabel
 - 4.4.2 Definisi Operasional Variabel
- 4.5 Lokasi Penelitian
- 4.6 Prosedur Pengambilan Data
- 4.7 Teknik Analisis Data
 - 4.7.1 Analisis dan Pengujian
 - 4.7.1.1 Asumsi Rekursif
 - 4.7.1.2 Uji Autokorelasi
 - 4.7.1.3 Uji Normalitas

- 4.7.1.4 Uji Linearitas
- 4.8. Bagan Alir penelitian

BAB 5 HASIL YANG DICAPAI

- 5.1 Deskriptif Variabel
 - 5.1.1 *Good Corporate Governance*
 - 5.1.2 Ukuran Perusahaan
 - 5.1.3 Kinerja Perusahaan
- 5.2 Analisis dan Hasil Pengujian
 - 5.2.1 Asumsi Rekursif
 - 5.2.2 Uji Autokorelasi
 - 5.2.3 Uji Normalitas
 - 5.2.4 Uji Linearitas
- 5.3. Analisis Regresi

BAB 6 RENCANA BERIKUNYA

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

- 7.1 Kesimpulan
- 7.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang melandasi hubungan antara manajer dan pemilik. Manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Kondisi agen dan prinsipal ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba. Adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah-masalah keagenan (*agency problems*). Masalah-masalah keagenan tersebut timbul karena adanya konflik atau perbedaan kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan *agent* (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat). Teori keagenan (*agency theory*) berusaha menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi konflik atau masalah keagenan (Jensen *and* Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Adanya kontrak yang efisien belum cukup untuk mengatasi masalah keagenan. *Corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto dkk., 2000).

Corporate governance dapat memberikan keyakinan pada investor tentang *return* yang diperoleh atas investasi ditanamkan (Shleifer *and* Vishny, 1997). *Corporate governance* mulai banyak dilaksanakan sejak terjadinya berbagai skandal bisnis yang mengindikasikan lemahnya *corporate governance* di perusahaan-perusahaan Inggris pada sekitar tahun 1950an dan semakin

berlanjut hingga menimbulkan resesi di tahun 1980an (Davies,1999:34-35). Pembentukan *The Cadbury Committee* di tahun 1991 yang bertugas untuk membuat *Code of Best Practice* adalah wujud dari respon terhadap terjadinya berbagai skandal bisnis di negara Inggris. Sejalan dengan perkembangan isu *corporate governance* di negara Inggris, di berbagai negara maju lainnya, seperti Amerika, Jerman, Perancis, Jepang, Rusia, Italia, dan Australia juga mulai marak didiskusikan. Pengalaman di Inggris, isu tentang *corporate governance* marak diperbincangkan berkaitan dengan adanya berbagai macam skandal bisnis di negara-negara tersebut. Saat ini, sebagian besar negara (termasuk Indonesia) telah memiliki badan/ lembaga/ institusi yang bertugas membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di negara yang bersangkutan. Bank dunia dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan prinsip-prinsip *corporate governance* di berbagai negara (termasuk Indonesia). Di berbagai negara bahkan sudah dilakukan pemeringkatan implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan.

Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) telah menerbitkan laporan praktik *corporate governance* dari 494 perusahaan di 24 negara pada bulan Maret 2001. *Korea Stock Exchange* (KSE) telah melakukan survei di tahun 2001 terhadap praktik-praktik *corporate governance* dari 540 perusahaan yang terdaftar di KSE. Dengan membatasi pada salah satu komponen *corporate governance*, yaitu pengungkapan (*corporate disclosure practices*), *Standard and Poors* pada tahun 2000 melakukan survei terhadap 573 perusahaan di 16 negara yang pasar modalnya sedang berkembang dan 3 negara maju.

Di Indonesia laporan hasil riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) secara

kontinyu dilakukan tiap tahun sejak tahun 2001. Selanjutnya hasil riset dan pemeringkatan ini dipublikasikan oleh Majalah SWA dan IICG secara nasional dan internasional. Apresiasi pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tidak sebatas prestasi yang dicapai dalam menerapkan GCG di lingkungan perusahaannya masing-masing, tetapi juga kesungguhan dan kesediaan secara sukarela untuk bersedia dinilai oleh pihak eksternal yang independen sebagai wujud kesadaran yang mendalam terhadap pentingnya penerapan GCG.

Didalam pengukuran praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan (Black *et al.*, 2003; Klapper *and* Love, 2002; Mitton, 2002; Darmawati dkk., 2004). Penelitian tersebut secara tidak langsung menunjukkan kegunaan (*usefulness*) dari pemeringkatan praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia).

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Fakta di lapangan berdasarkan survei dari Konsultan McKinsey, menunjukkan bahwa menurut pandangan pemodal asing, Indonesia merupakan negara terburuk dalam penerapan *good corporate governance* (McKinsey dalam Hutagalung, 2004). Hal tersebut diukur dengan rata-rata *premium* yang dibayar oleh pemodal bagi perusahaan yang dikelola secara baik di suatu negara. Data tersebut menunjukkan ada korelasi antara persepsi mengenai mutu *corporate governance* perusahaan-perusahaan di sebuah negara dan besarnya *premium* yang dibayar oleh para investor bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik. Semakin baik persepsi *corporate governance* di sebuah negara, semakin tinggi pula *premium* yang dapat mereka berikan kepada perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik.

Berdasarkan studi *Asian Development Bank/ ABD* tahun 2000 dalam Pratolo, (2006) telah diidentifikasi bahwa krisis keuangan Asia tahun 1997, salah satu sumber utama kerentanan ekonomi lima negara Asia, termasuk Indonesia, adalah kelemahan penerapan *good corporate governance*. Krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut diidentifikasi karena praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Indonesia. Gambaran tentang tingkat korupsi dan kronisme di Indonesia sebagaimana hasil survei yang dilakukan *Survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*-Hongkong dalam (Pugeg, 2001:3) terlihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tertinggi tingkat korupsi dan tertinggi tingkat kroniismenya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ABD (2000) menyatakan perusahaan di Asia Timur pada umumnya belum memiliki profesional dalam mengelola bisnisnya. Untuk mencegah terulangnya krisis yang melanda kawasan Asia Timur, negara-negara di kawasan tersebut memerlukan suatu pedoman untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengelola bisnis serta meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham tanpa mengabaikan perlindungan terhadap *stakeholders* lainnya. Pedoman tersebut saat ini lebih dikenal dengan *good corporate governance* yang memiliki lima dasar pemikiran, yaitu: kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kemandirian.

Buruknya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terkait dengan daya saing perusahaan di Indonesia. Sesuai laporan tahunan peringkat daya saing sejumlah negara di dunia yang dikeluarkan *The International Institute for Management Development (IIMD)*, Laussane, Swiss tanggal 26 April 2001 menyatakan Indonesia berada dalam posisi terendah dari 49 negara yang diteliti sebagaimana dipaparkan Kompas dalam Pratolo (2006). Terdapat dua hal yang mendasari perlunya penerapan prinsip *good corporate governance* di Indonesia

(Wulandari, 2000:6). Pertama, tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif menjelang abad 21 yang merupakan tuntutan era perdagangan bebas yang memperbolehkan setiap pelaku bisnis bebas melakukan kegiatannya di negara manapun. Kedua, terdapat tuntutan secara langsung dari lembaga donor, agar perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Literatur di berbagai negara tentang implementasi *good corporate governance* dan manfaatnya, lebih banyak berbicara tentang tantangan bisnis ke masa datang (globalisasi) yang tidak mengenal tempat, ruang dan waktu. Beberapa praktisi dunia usaha yakin penerapan prinsip *good corporate governance* merupakan satu-satunya cara untuk menjawab tantangan itu. Pratolo (2006), menyatakan globalisasi dan ekonomi pada tata perusahaan yang baik tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan Internasional. Manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Efisiensi dan produktivitas sangat dibutuhkan dalam kompetisi global sebab produktivitas dan efisiensi usaha merupakan jawaban menghadapi kompetisi global di tengah situasi yang *turbulence*. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam praktiknya menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan, dengan demikian dapat menghindari inefisiensi dan *opportunity cost* yang tidak perlu.

Berdasarkan **Tabel 1.1** menunjukkan kualitas *corporate governance* perusahaan di Indonesia masih rendah, ini terlihat dari peringkat ke sepuluh menurut survei dari ACGA. Didalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, menuntut pelaksanaan *Good Government Governance*. Menurut survei pada tahun 1999 yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Coopers* terhadap investor-investor internasional menunjukkan bahwa Indonesia

dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan bagian dari sistem nasional dan tidak bisa dilepas atas peran pemerintah.

Peringkat penetapan standar *corporate governance* di beberapa negara termasuk Indonesia oleh ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) dapat dilihat pada **Tabel 1.1** halaman 8 sebagai berikut:

TABEL 1.1
PERINGKAT *CORPORATE GOVERNANCE* DI ASIA
Tahun 2007

No.	Nama Negara	Perangkingan
1.	Hongkong	1
2.	Singapura	2
3.	India	3
4.	Taiwan	4
5.	Jepang	5
6.	Korea	6
7.	Malaysia	7
8.	Thailand	8
9.	China	9
10.	Philipina	10
11.	Indonesia	11

Sumber: ACGA (*Asian Corporate Governance Association*), 2007.

Didalam penerapan *good government governance*, pemerintah aktif melakukan usaha untuk memberantas korupsi dan penegakan hukum yang menjadi prioritasnya. Dalam rangka operasionalisasi perwujudan *good government governance* di Indonesia. Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. KEP-49/M. EKON/ 11/ TAHUN 2004 tentang

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) ada pasal ke-2 menyatakan bahwa Komite Nasional Kebijakan *Governance* bertugas untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman dan penerapan *good governance* di Indonesia, memberi masukan dan pendapat kepada Pemerintah Republik Indonesia, serta lembaga-lembaga dan badan lainnya mengenai pengembangan kebijakan dan pelaksanaan *good governance* di bidang korporasi maupun di bidang publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nasional Kebijakan *Governance* memiliki visi dan misi. Visi KNKG yaitu mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan *corporate governance* terbaik di dunia. Misi KNKG yaitu mendorong dan meningkatkan efektivitas penerapan *corporate governance* di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan *good governance* di sektor publik maupun korporasi.

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* (GCG) Surya dan Yustiavandana (2006) seperti *fairness* (keadilan), *independensi* (kemandirian) *transparancy* (transparansi), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *responsibility* (pertanggungjawaban) sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*. Penerapan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan perusahaan dalam menjalankan aktivitas untuk mendapatkan laba. Investor akan melihat prospek dalam berinvestasi yakni keuntungan, investor tidak akan menginvestasikan pada proyek-proyek yang tidak menguntungkan, selain itu berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dewan komisaris memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pemakaian sumber daya yang dilakukan oleh dewan direksi supaya selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Didalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dituntut untuk bertindak independen terhadap dewan direksi agar fungsi monitoring menjadi efektif sehingga akan meminimalisir

kecenderungan tindakan manipulasi yang akan dilakukan oleh manajemen. Dukungan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap efektifitas monitoring ditunjukkan oleh beberapa penelitian terhadap independensi dewan komisaris terhadap *earnings management* (Klein, 2002a; Yermarck, 1996; Kakabadse *et al.*, 2001; Syakhroza, 2003; Beasley, 1996; Wedari, 2004; Davidson *et al.*, 2005).

Prinsip GCG yang dikeluarkan oleh OECD menyatakan “*The board should be able to exercise judgement on corporate affair independent in particular, from management*”. Independensi yang dimaksud OECD adalah masing-masing anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan terlalu dekat dengan manajemen maupun dengan perusahaan melalui transaksi-transaksi ekonomi yang jumlahnya signifikan, hubungan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dewan komisaris dapat bertindak secara obyektif. Jadi tujuan dari independensi dapat dikatakan dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dapat berfungsi secara obyektif. Implikasi dari independensi adalah tercapainya *good corporate governance* secara obyektif karena kontrol terhadap dewan direksi lebih terjamin

Tanggung jawab dan tugas komite audit menurut pedoman GCG adalah mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan perusahaan agar dapat menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit serta kemandirian dan obyektivitas eksternal auditor, mempersiapkan surat yang menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku. Diharapkan komite audit dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif sehingga tujuan *good corporate governance* dapat tercapai. Baridwan (2002) menyatakan bahwa komite audit mempunyai peranan penting dalam *good corporate governance*. Millstein (1999) mendukung argumen ini, menurutnya bahwa hal penting dari

praktek *good corporate governance* adalah memperbaiki kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dicapai dengan adanya komite audit yang efektif.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva (Hartono, 2000:254). Hal ini didukung oleh penelitian Chichello (2005) yang menggunakan total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan. Sujana (2004), menyatakan perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan. Perusahaan besar cenderung mendominasi posisi pasar dalam industrinya, sehingga seringkali perusahaan besar lebih memiliki keunggulan kompetitif dalam mengeksplorasi kesempatan investasi, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bertumbuh secara signifikan merupakan perusahaan yang lebih besar karena perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal sehingga lebih mudah untuk mendapatkan tambahan dana yang kemudian dapat meningkatkan profitabilitas (Elton dan Gruber, 1994 dalam Hartono, 2000). Hartono (2000), menyatakan ukuran perusahaan sebagai logaritma dari total aktiva diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan risiko, dia juga menghipotesiskan bahwa perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah dan risiko yang rendah, untuk menghindari laba yang berlebihan. Perusahaan yang besar cenderung mendapat sorotan yang besar dari masyarakat dan pemerintah

sehingga akan terbebani biaya politik yang besar. Selain itu fluktuasi *earning* yang berlebih akan menarik perhatian pemerintah dan akan dianggap sebagai signal adanya praktik monopoli.

Informasi yang biasanya dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya informasi tentang laba. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) tahun 1992 Nomor 1 menyatakan laba sebagai komponen dari laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir risiko investasi. Pentingnya informasi laba bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi telah dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain Foster (1978), Beaver *et al.* (1979) dengan menggunakan sampel publik di Amerika menunjukkan bahwa terdapat reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Reaksi tersebut tercermin dari naik turunnya harga saham di sekitar tanggal pengumuman. Penelitian empirik dengan sampel perusahaan publik di Indonesia yang dilakukan oleh Purba (1997), Beza (1997) menyimpulkan bahwa informasi laporan keuangan atau laba memberikan nilai informasi yang berarti bagi investor dalam pengambilan keputusan mereka. Beattie (1994) menyatakan laba menjadi pertimbangan investor dalam mengukur kinerja manajemen untuk mengambil keputusan investasinya tanpa mempertimbangkan prosedur yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Black *et al.* (2005); Klapper Love (2002) memberikan bukti bahwa *corporate governance* merupakan faktor penting dalam menjalankan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Berghe Rider dalam Kakabadse *et al.* (2001) menyatakan hubungan kinerja perusahaan dengan *corporate governance* tidak mudah dilakukan. Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh penilaian pelaksanaan GCG pada kinerja perusahaan. Ketika penilaian pelaksanaan GCG semakin baik akan memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Dasar pemikirannya apabila suatu perusahaan telah mempraktikan

prinsip-prinsip GCG secara efektif didalam perusahaan akan berdampak positif pada kinerja perusahaan, sebaliknya rendahnya kualitas penerapan GCG dalam suatu perusahaan akan berdampak negatif pada kinerja perusahaan yang bersangkutan.

Pada penelitian sebelumnya, biaya politik umumnya diproksikan dengan ukuran perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka cenderung lebih sensitif dengan biaya politik. Prediksi yang dilakukan oleh teori akuntansi positif umumnya berkisar pada hipotesis yang diformulasi oleh Watts *and* Zimmerman (1986) yakni hipotesis biaya politik, hipotesis ini menyadari pada kedekatan perusahaan dengan pentransferan bagian kesejahteraan perusahaan kepada pihak lain (biaya politik). Perusahaan yang besar umumnya dituntut untuk menstransfer bagian kesejahteraan yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat.

Beberapa penelitian menyatakan *corporate governance* merupakan faktor penting dalam menjalankan kinerja perusahaan. Sesuai dengan misi KNKG mendorong dan meningkatkan efektivitas penerapan GCG di sektor publik maupun koporat di Indonesia, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) melakukan perangkingan terhadap penerapan GCG. Perseroan terbuka yang ikut dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh IICG pada tahun 2004 sebanyak 9 perusahaan, tahun 2005 sebanyak 20 perusahaan, tahun 2006 sebanyak 16 perusahaan, tahun 2007 sebanyak 13 perusahaan, tahun 2008 sebanyak 13 perusahaan.

Menurut IICG (2008) dan IICG (2009) jumlah Peseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 407, berkisar 5 persen yang bersedia dilakukan survei oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran dari perusahaan untuk berpartisipasi pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Pelaksanaan CGPI masih menghadapi tantangan yang sama dari tahun ke tahun

yaitu mengenai jumlah perusahaan yang bersedia mengikuti pemeringkatan penerapan GCG masih relatif sedikit. Hal ini disebabkan *sampling method* program CGPI berdasarkan kesukarelaan perusahaan, sehingga peningkatan jumlah peserta tidak dapat dikontrol oleh IICG.

Hasil penilaian CGPI 2008 diperoleh kepastian informasi perusahaan yang berhasil mendapatkan peringkat, merupakan perusahaan yang telah berkomitmen terhadap GCG secara terencana (*deliberate*). Hasil yang diperoleh akan digunakan menetapkan secara spontan niatan strategik dan visi kedepan serta akan menata kesiapan perangkat pendukung baik secara struktural maupun fungsional, materi maupun non materi, sebagai sebuah kesepakatan dan mekanisme bersama (*top down-bottom up mechanism*) untuk menciptakan keunggulan dan kinerja perusahaan yang unggul dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan *stakeholders*.

Penegakan GCG memerlukan komitmen dan dukungan bersama baik dari pihak internal perusahaan maupun dari para *stakeholder* dan pihak eksternal lainnya. Program CGPI tidak hanya sekedar menilai kualitas tata kelola perusahaan melainkan mengajak perusahaan untuk meningkatkan komitmen dan kualitas tata kelola melalui sosialisasi, *benchmarking*, dan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. IICG meyakini CG merupakan sebuah proses panjang yang memerlukan konsistensi, keteraturan, dan komitmen dari seluruh *stakeholder* dan manajemen perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) menuju kesinambungan eksistensi perusahaan.

Penelitian ini menguji pengaruh GCG dan ukuran perusahaan terhadap Kinerja perusahaan.

Penelitian ini mengambil data pada perseroan terbuka yang ikut dalam peserta CGPI tahun 2004 - 2008. Menurut UU No. 40 tahun 2007, Perseroan Terbuka merupakan Perseroan

Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan Publik merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan identifikasi dan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang:

“Pengaruh *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada perseroan terbuka peserta CGPI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian yang telah, maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.5 Urgensi Penelitian

Motivasi dari penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, isu mengenai penilaian pelaksanaan GCG yang dipakai acuan penilaian IICG belum pernah diteliti secara empiris sebelumnya. Penilaian pelaksanaan GCG sebagai alat ukur CGPI yang dilakukan IICG melalui 4 penilaian yaitu: *self assessment*, kelengkapan dokumen, makalah dan presentasi perusahaan, observasi perusahaan

Kedua, konsep *corporate governance* tidak hanya melekat pada sistem dan penataan struktur melainkan menjadi bagian strategik dan memberikan arahan masa depan serta perilaku dan sikap perusahaan terhadap tantangan dan perubahan yang dihadapi dengan tetap memegang prinsip bisnis yang beretika, profesional, dan bertanggungjawab. Hal ini berkaitan dengan tindakan *earnings management* untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Ketiga, Ukuran perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Perusahaan yang lebih besar (dalam ukuran total aset) menerima lebih banyak perhatian dari analis dan lebih dikenal dibanding yang lain (perusahaan kecil). Hal ini berkaitan dengan tindakan perusahaan mengelola perusahaan yang mempunyai jumlah asset besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Keempat, hasil penelitian mempunyai implikasi penting bagi perseroan terbuka dalam menciptakan keunggulan dan kinerja perusahaan yang unggul dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* dan pemegang saham.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Suatu organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas pengendalian dengan aktivitas operasional, antara pemilik dan pengelola. Ketika pengendalian perusahaan tidak lagi diserahkan pada pemilik tetapi kepada pihak lain, maka permasalahan yang muncul adalah potensi konflik pemilik (*principals*) dengan pengelola (*agents*) yang sering disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak berusaha untuk memperoleh kepuasan yang maksimal maka terdapat alasan tepat untuk dipercaya bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal.

Watts and Zimmerman (1990) secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan yaitu pemilik dengan manajemen, kreditur dengan manajemen dan pemerintah dengan manajemen. Pengertian *principal* tidak hanya pemilik perusahaan tetapi juga kreditur dan pemerintah. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pemilik (*principals*) perlu mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Masalah agensi muncul ketika manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka, sehingga dalam hal ini agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mengejar kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Hal ini biasanya dilakukan agen dengan

memberikan informasi tentang hasil kinerjanya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya melalui penggunaan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya.

Teori agensi merupakan dasar model agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal, penetapan agensi oleh prinsipal untuk mewakilinya. Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* (Mursalim, 2005), yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggung jawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Kondisi antara *agent* dan *principal* ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Di satu sisi, *agent* memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*nya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Kebijakan-kebijakan tertentu disinyalir dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.

Kaitan *agency theory* dengan penelitian ini, penerapan GCG dapat mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan. Peningkatan GCG dapat mengurangi tindakan *earnings management*. *earnings management* adalah suatu tindakan yang dilakukan manajer yang diakibatkan adanya masalah agensi antara *principals* dan *agents*. Tindakan ini tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain, hal ini karena manajer memperoleh kompensasi dari pekerjaannya dengan jumlah yang kecil, sehingga perubahan kemakmuran manajer sangat kecil dibandingkan perubahan kemakmuran pemilik/ pemegang saham (Jensen dan Murphy, 1990). Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian akuntansi positif yang menemukan manajer melakukan manipulasi laba atau *earnings management* (Healy, 1985).

Terkait dengan mekanisme *good corporate governance*, Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan teori keagenan untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan antara *principals* dan *agents*, salah satunya dengan melalui pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). *Good Corporate Governance* berpegang pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, mandiri dan kewajaran. Dengan adanya mekanisme *Good Corporate Governance* yang meliputi struktur kepemilikan (Rajgopal dan Venkatachalam, 1998; Mitra dan Cready, 2005), dewan komisaris (Beasley, 1996; Klein, 2002a), komite audit (Kalbers dan Fogarty, 1993; Chtourou *et al.*, 2001) beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* dapat meminimalisir adanya masalah agensi.

Jensen and Meckling (1976), mendefinisikan hubungan agensi adalah suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) menggunakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pelayanan pada kepentingan mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa pengambilan keputusan yang dilakukan agen. Dalam konteks perusahaan, teori agensi

memberikan kerangka dasar yang mengenai konflik menarik antara manajer, pemegang saham, kreditur. Jensen *and* Meckling (1976) berpendapat perjanjian kontrak kerja dapat mengurangi biaya agensi. Dalam struktur, 2 bentuk hubungan kontrak yaitu: (1) antara perusahaan, manajer, agen dan pemegang saham perusahaan, (2) antara pemegang saham dan kreditur.

Biaya agensi didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pemegang saham untuk mendorong manajer meningkatkan kesejahteraan pemegang saham daripada bertindak untuk mengutamakan kepentingan pribadinya. Istilasi biaya agensi sering dikaitkan dengan Jensen *and* Meckling (1976). Mereka menyatakan bahwa tingkat hutang perusahaan (*corporate debt levels*) dan tingkat kepemilikan manajemen (*management equity levels*) dipengaruhi oleh biaya agensi.

Terdapat tiga kategori biaya agensi: (1) pengeluaran untuk memantau aktivitas manajerial, semacam biaya audit, (2) pengeluaran untuk membentuk struktur organisasi yang dapat membatasi perilaku manajerial yang tidak diharapkan, semacam pengangkatan *board of director* dari pihak luar atau restrukturisasi unit bisnis perusahaan dan hirarki manajemen, dan (3) biaya oportunitas, seperti memberikan hak prioritas kepada pemegang saham untuk memilih pada isu-isu utama, dengan melakukan pembatasan-pembatasan kepada manajer untuk mengambil tindakan.

Ketidakmampuan pemegang saham untuk mencegah perilaku manajerial yang tidak diharapkan, akan menyebabkan hilangnya kesejahteraan pemegang saham karena tindakan manajemen. Di sisi lain, biaya agensi akan meningkat jika pemegang saham menginginkan untuk menjamin bahwa setiap tindakan manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Biaya agensi optimal yang dibebankan kepada pemegang saham ditentukan dalam konteks biaya

manfaat. Peningkatan biaya agensi seharusnya sejalan dengan peningkatan nilai rupiah kesejahteraan pemegang saham.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Perkembangan teori akuntansi sejak tahun 1930 sampai 1970 bersifat *normative accounting theory* yaitu mengkaji bagaimana seharusnya akuntansi berjalan dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Teori normatif berusaha menjelaskan informasi apa yang seharusnya dikomunikasikan kepada pemakai informasi akuntansi dan bagaimana informasi tersebut dapat akan disajikan. Jadi teori normatif berusaha menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan (*what ought to be*) dalam proses penyajian informasi keuangan kepada para pemakai dan bukan menjelaskan tentang apakah informasi keuangan itu (*what it*) atau mengapa hal itu terjadi.

Teori normatif mulai dipertanyakan kembali relevansinya terutama pada pertengahan tahun 60-an, dengan munculnya hipotesis pasar modal yang efisien (*efficient market hypothesis*), menyebabkan munculnya gagasan yang berlawanan dengan konsep *normative*. Watts dan Zimmerman (1990) menyatakan dasar pemikiran untuk menganalisis teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Alasan-alasan yang mendasari terjadinya pergeseran pendekatan teori *normative* ke teori positif (Budiarto, 2003):

- a. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris
- b. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
- c. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya secara optimal di pasar modal

Teori akuntansi positif berusaha menjelaskan dan menguraikan apa dan bagaimana praktek akuntansi tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dapat diuji dengan dunia empiris sehingga lebih berhasil menyelesaikan masalah praktek akuntansi. Watts and Zimmerman (1990) menyatakan teori akuntansi menyediakan seperangkat prinsip atau konsep-konsep yang luas untuk memberikan jawaban terhadap praktek akuntansi yang berlaku dan memprediksikan/meramalkan fenomena-fenomena yang berlaku. Sejalan dengan perubahan lingkungan tempat akuntansi beroperasi. Konsep dalam teori akuntansi harus selalu dikembangkan agar terpelihara sebagai pengetahuan dan relevan untuk pedoman praktek akuntansi.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Pedoman tentang penerapan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* belum ada yang diterima secara aklamasi di seluruh dunia. Penerapan *good corporate governance* selalu memperhatikan berbagai macam faktor, termasuk faktor khusus di masing-masing negara. Sutojo dan Aldridge (2008: 15) belum adanya pedoman yang dapat diterima secara aklamasi, pada dasarnya disebabkan karena dua macam faktor. Pertama, sebagai disiplin ilmu, sejak awal dekade tahun 2000 konsep *good corporate governance* menjadi pusat perhatian masyarakat bisnis dan pemerintah di sebagian besar negara di dunia. Kedua, penerapan *good corporate governance* dipengaruhi banyak faktor intern dan ekstern perusahaan masing-masing negara. Faktor-faktor intern dan ekstern tersebut menyebabkan pemerintah dan masyarakat bisnis di negara tertentu tidak dapat begitu saja menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan di negara lain secara berhasil. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak bisa begitu saja mengadopsi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diterapkan berhasil di Amerika, Australia dan Eropa.

The Indonesia Institute for Corporate Governance/ IICG (2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan

perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai-nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan *stakeholder* yang lain. The *Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD* (2004) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives and monitoring performance”

Sesuai definisi OECD tersebut *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, *shareholders* dan non pemegang saham. *Corporate governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus *Board of Directors* dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan. Dengan pertimbangan tugas, hak dan kewajiban serta ketentuan prosedur pengambilan keputusan penting, perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha (*corporate objective*) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Pembagian tugas, hak dan kewajiban berfungsi sebagai pedoman bagaimana mengevaluasi kinerja *Board of director* dan manajemen perusahaan.

The Australian Stock Exchange/ ASX (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the compzny set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized”

Sesuai dengan kutipan ASX mengartikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun upaya mencapai sasaran tersebut. *Corporate governance* juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Forum *corporate governance* di Indonesia (FCGI) menggambarkan *corporate governance* sebagai satuan aturan memelihara hubungan antara pemegang saham, para manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemilik internal dan eksternal penting yang lain yang berhubungan dengan hak dan tanggung-jawab mereka. Sasaran *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah karena penting untuk pihak pemilik. Dengan pemisahan peran antara pemegang saham (prinsipal) dan para manajer (agen), para manajer mempunyai suatu kendali penting dalam mengelola dana investor (Jensen *and* Meckling, 1976 dan Shleifer *and* Vishny, 1997).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu perusahaan atau organisasi menjalankan (operasi) dan mengontrol atau sebagai tata kelola perusahaan (organisasi). Sistem ini mengatur secara jelas dan tegas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait telah tercantum dalam *Code of Conduct* dalam GCG. Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/ 49/ M.EKON/ 11/ 2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan *good governance* di sektor publik.

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outsider investor/minoritas shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh manajer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal (Shleiver dan Vishny, 1997). Pendekatan legal dari *corporate governance* memiliki arti bahwa mekanisme kunci dari *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal (*outsider investor*), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui sistem legal, yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* bervariasi antar satu negara dengan negara lain. Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan sistem hukum yang melindungi investor antar negara (La Porta *et al.*, 2000). Perbedaan dalam sistem hukum tersebut akan berpengaruh pada struktur dalam sistem kepemilikan, perkembangan pasar modal dan perekonomian suatu negara (La Porta *et al.*, 2000).

Sudarmanto (2004: 34) model penerapan *good corporate governance* untuk mengantarkan perusahaan menjadi *good governed company* (G2C) melalui 3 (tiga) tahap yaitu *comprehension* (pemahaman secara mendalam), *consolidation* (konsolidasi manusia dan sistem), *continuous improvement* (perbaikan terus menerus). Tahap pertama, pemahaman secara mendalam merupakan tahapan awal dalam penerapan GCG di perusahaan. Unsur yang harus dipahami pada tahap *comprehension* (pemahaman secara mendalam) yaitu prinsip GCG dan *key person*. Salah satu indikator keberhasilan dalam tahap *comprehension* adalah terlaksananya *Self Assessment* GCG.

Tahap kedua, *consolidation* (konsolidasi manusia dan sistem) merupakan jembatan emas G2C. Sudarmanto (2004: 39) ada dua unsur utama yang harus dibangun pada tahap konsolidasi

manusia dan sistem yaitu *system* dan *commitment*. Membangun sistem dan infrastruktur GCG dapat dilakukan perusahaan bersama tim yang dibentuk atau dengan *outsourcing*, artinya pekerjaan tersebut dapat diserahkan kepada konsultan GCG yang kompeten. Membangun komitmen dari manusia, terutama *key persons* harus mencari model pendekatan yang tepat sehingga seluruh *key persons* perusahaan akan komit dengan penerapan GCG di perusahaan.

Tahap ketiga, *continuous improvement* (perbaikan terus menerus) yaitu perusahaan masuk dalam organisasi pembelajaran (*learning organization*). Dalam organisasi perusahaan, perusahaan merupakan wadah atau media bagi seluruh anggota organisasi untuk mengelola pengetahuan (*knowledge management*) melalui *continuous improvement* dalam kerangka *creating value*. Unsur utama yang harus diperhatikan pada tahap *continuous improvement* (perbaikan terus menerus) *learning* dan *sharing* (pembelajaran dan pengajaran). Mekanisme pengorganisasian perusahaan dalam penerapan GCG harus diciptakan situasi *learning* dan *sharing* (pembelajaran dan pengajaran) yang kondusif dan efektif serta efisien yang melibatkan seluruh anggota organisasi sehingga masing-masing individu dapat berperan dalam memberikan kontribusi yang nyata untuk menciptakan nilai perusahaan.

2.1.3.1 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) tahun 2001, setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Penerapan *good corporate governance* baik di suatu negara ataupun di perusahaan memerlukan suatu identifikasi prinsip-prinsip dari konsep *good corporate governance* itu

sendiri. Konsep *good corporate governance* merupakan konsep yang bersifat general dan universal untuk pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara atau perusahaan yang bersangkutan. Prinsip – prinsip dasar *good corporate governance* (GCG) seperti *fairness* (keadilan), *Independensi* (kemandirian) *transparency* (transparansi), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *responsibility* (pertanggungjawaban) sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*.

2.1.3.2 Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Nicolo *et al.* (2008) menyatakan *Index Corporate Governance Quality* (CGQ) meliputi 3 indikator yaitu: *Accounting Standards* (AS), *Earnings Smoothing* (ES), and *Stock Price Synchronicity* (SPS). Index CGQ merupakan 3 *proxi* pengukuran hasil *corporate governance* dalam dimensi pengungkapan akuntansi dan transparansi. Pengungkapan akuntansi dan transparansi diperlukan untuk menuju GCG karena tingkat informasi asimetri antara para manajer dan *stakeholder* ditunjukkan dengan *corporate governance*.

Perusahaan dapat meningkatkan kemakmuran para pemegang saham dengan meningkatnya harga saham. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Horne (1991:215) dalam Dewi (2004) yang mengatakan bahwa memaksimumkan nilai perusahaan dimulai dengan meningkatkan harga saham, berarti memberi peningkatan kemakmuran bagi pemegang saham. Dengan adanya kondisi yang demikian ini harga saham dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang masuk sepuluh besar *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) akan lebih tinggi dibandingkan perusahaan Non sepuluh besar CGPI.

Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) di Indonesia dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). *The Indonesian Institute for*

Corporate Governance (IICG) didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 merupakan sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia. Pernyataan visi menjadi lembaga yang independen dan bermanfaat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat, menjadi inspirasi IICG untuk senantiasa berupaya mensyarakatkan konsep, praktik dan manfaat GCG kepada dunia bisnis khususnya masyarakat luas pada umumnya. Kegiatan utama yang dilakukan IICG adalah melaksanakan riset penetapan penerapan GCG, yang hasilnya berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Peserta pemeringkatan CGPI yang dilakukan oleh IICG diikuti oleh perusahaan terbuka, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta. Hasil riset IICG berupa skor dan indeks persepsi penerapan GCG pada Perusahaan Publik, Swasta, Perbankan, dan BUMN di Indonesia. Menurut IICG (2005), IICG (2006), IICG (2007), IICG (2008), IICG (2009) pemeringkatan CGPI disusun berdasarkan kategori tingkat kepercayaan dengan selang nilai yang telah ditetapkan, yaitu terdiri dari 3 kategori: sangat terpercaya (skor 55-69), terpercaya (skor 70-84), dan cukup terpercaya (skor 85-100).

Aktivitas GCG melalui penerapan prinsip dasar *transparency, accountability, responsibility, independensi dan fairness*. *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) melakukan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) melalui 4 (empat) tahap. yaitu (1) *self assessment* dengan nilai 15% (persen), (2) kelengkapan dokumen dengan nilai 25 % (persen), (3) makalah dan presentasi dengan nilai 12% (persen) dan (4) observasi perusahaan dengan nilai 48% (persen).

Self assesment adalah sebuah proses penilaian objektif dari perusahaan atas dirinya sendiri yang berkaitan dengan penyelarasan sistem GCG dalam semua proses bisnis melalui

penetapan, pelaksanaan dan evaluasi strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang berkelanjutan (manajemen stratejik). *Self assessment* dilaksanakan melalui pengisian kuesioner oleh seluruh *stakeholder* perusahaan. IICG (2009) aspek penilaian *self-assessment* secara lebih rinci menilai faktor-faktor sebagai berikut: komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerjasama, pernyataan visi, misi dan tata nilai, moral dan etika, strategi. Penilaian *self assessment* sebesar 15% (persen) dari total penilaian pelaksanaan GCG.

Komitmen, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan inisiatif dan strategi serta kebijakan perusahaan dalam rangka menerapkan konsep CG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama. Transparansi, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam menyampaikan berbagai informasi perusahaan secara tepat waktu dan akurat, termasuk informasi tentang proses merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama.

Akuntabilitas, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan wajar, termasuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama. Responsibilitas, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dalam menjamin terlaksananya proses perumusan, implementasi serta evaluasi strategi

dan kebijakan perusahaan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama.

Independensi, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan terhadap partisipan lainnya, termasuk dalam menjamin tidak adanya dominasi dan intervensi dari satu partisipan manapun dalam proses merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama.

Keadilan, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh pemegang saham (*shareholders*), termasuk mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders* dalam proses merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam proses tersebut secara bersama-sama.

Kompetensi, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan otoritasnya sesuai dengan peran dan fungsinya, inovatif dan kreatif, termasuk menunjukkan kemampuannya untuk merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG secara tepat, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk melakukannya secara bersama-sama.

Kepemimpinan, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat mentransformasikan perusahaan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam menunjukkan corak kepemimpinan yang dapat membimbing anggota perusahaan untuk

merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama. Kemampuan Bekerjasama, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam membangun kerjasama guna mencapai tujuan bersama secara bermartabat, termasuk dalam membangun kerjasama untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama.

Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai, yaitu acuan dalam mewujudkan, Kesungguhan organ perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandung di dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan dan menjadikan pokok-pokok tersebut sebagai panduan perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat menumbuhkan tekad dan semangat para anggota perusahaan untuk mencapai pokok-pokok tersebut secara bersama-sama.

Moral dan Etika, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses bisnis, termasuk dalam proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta dapat mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama.

Strategi, yaitu wujud kesungguhan organ perusahaan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, sebagai respon terhadap perubahan di lingkungan internal dan eksternal

perusahaan agar dapat mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan, dan kesungguhan ini dapat dirasakan serta mendorong anggota perusahaan untuk ikut melakukannya secara bersama-sama. Kelengkapan dokumen untuk perusahaan publik (emiten) mempersyaratkan sekurang-kurangnya 32 dokumen. Kelengkapan dokumen tersebut dikaji dan dianalisa untuk kemudian dikelompokkan menjadi tujuh aspek yang mewakili *governance structure*, *governance process*, *governance system*, *governance mechanism*, *governance output*, *governance outcome*, dan *governance impact*. Peserta CGPI diwajibkan menyerahkan dokumen, mencakup dokumentasi dalam adaptasi dan penjabaran prinsip-prinsip GCG yang dipergunakan perusahaan dalam mekanisme pengelolaan perusahaan. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan untuk menelusuri wujud dan upaya penyempurnaan GCG sebagai sebuah sistem. Penilaian kelengkapan dokumen sebesar 25% (persen) dari nilai total penilaian pelaksanaan GCG.

Makalah dan presentasi, makalah disusun menurut sistematika penyusunan yang ditetapkan guna mempermudah prosedur penilaian dan selanjutnya akan membantu penulisan publikasi praktik GCG di perusahaan sebagai rangkaian kelanjutan pelaksanaan program CGPI. Membuat makalah terdiri dari abstrak, pendahuluan (latar belakang, tujuan aktualisasi GCG sebagai sistem, sasaran aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem, manfaat aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem), proses penyelarasan sistem (pendekatan dan pentahapan aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem), mekanisme aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem), hasil aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dan penutup. Penilaian makalah dan presentasi sebesar 12% (persen) dari nilai total penilaian pelaksanaan GCG

Observasi perusahaan merupakan salah satu bagian penting penilaian dan mempunyai nilai yang paling besar dari proses riset dan pemeringkatan CGPI. Observasi merupakan kegiatan peninjauan langsung ke perusahaan peserta CGPI. Didalam observasi membahas sejauh mana

perusahaan telah menyempurnakan CGPI sebagai sebuah sistem. Tim peneliti riset dan pemeringkatan CGPI dapat langsung melakukan verifikasi data dan dokumentasi perusahaan yang dibutuhkan untuk kepentingan riset dan pemeringkatan CGPI. Pihak perusahaan yang diminta untuk hadir pada saat observasi adalah perwakilan dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi *Corporate Secretary*, dan manajer-manajer terkait dalam implementasi GCG. Penilaian observasi ke perusahaan sebesar 48% (persen) dari nilai total penilaian pelaksanaan GCG.

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merujuk pada jumlah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva (Ferry and Jones 1979). Atkins and Lowe (1997) mengungkapkan bahwa konsep ukuran dapat didekati dari proses manajemen yang dilakukan. Menurut mereka, ukuran tergantung pada kriteria pengukuran yang dilakukan.

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan batasan suatu organisasi dibentuk (Kumar *et al.* 1999). Ukuran perusahaan dapat dipandang secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan cara pengukurannya. Suatu perusahaan dapat diklasifikasi sebagai perusahaan besar pada kriteria tertentu, tetapi menjadi kelompok perusahaan kecil jika diklasifikasi pada kriteria yang lain.

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang berkaitan dengan perbandingan suatu entitas dengan entitas lainnya yang ditetapkan (Axtell, 2006). Suwito dan Herawaty (2005) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan

menengah dan perusahaan kecil. Mengikuti pendekatan hak, Hard *and* Moore (1990) menekankan aset sebagai sumber daya utama yang sangat penting dan kepemilikannya merupakan mekanisme yang dapat membuat perusahaan memiliki daya tawar berbeda dengan perusahaan lain. Elton *and* Gruber (2000) bahwa perusahaan yang memiliki aset besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang asetnya sedikit. Perusahaan dengan aset besar lebih mempunyai akses ke pasar modal yang lebih baik sehingga dianggap mempunyai beta yang lebih kecil. Ukuran aktiva dianggap merupakan proksi yang paling tepat sebagai ukuran perusahaan (Ashari *et al.*, 1994; Darraugh *et al.*, 1998; Beattie *et al.* 1994; Chaney and Jeter, 1992; Zuroh, 1996; Kumarudin *et al.*, 2003; Makaryanawati, 2003).

Menurut Miswanto dan Husnan dalam Riyanto (2002), ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Perusahaan besar mempunyai risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Perusahaan kecil cenderung bekerja kurang efektif dan efisien.

Soliha dan Taswan (2002) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar memudahkan perusahaan dalam masalah pendanaan. Perusahaan umumnya memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan melalui pasar modal. Kemudahan ini bisa ditangkap sebagai informasi yang baik. Ukuran perusahaan yang besar dan tumbuh bisa merefleksikan tingkat profit dimasa mendatang.

Dalam suatu ukuran perusahaan yang besar, struktur kepemilikan perusahaan menjadi lebih menyebar. Kepemilikan saham perusahaan yang tersebar membuat pemilik perusahaan

lebih sulit mengendalikan aktivitas manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dibutuhkan biaya pengawasan yang lebih besar. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa biaya keagenan akan meningkat seiring dengan peningkatan ukuran perusahaan dikarenakan kepemilikan saham perusahaan yang semakin tersebar. Hal ini mengakibatkan semakin besar ukuran perusahaan, maka masalah keagenan yang timbul antara para pemegang saham dengan manajemen perusahaan menjadi lebih kompleks. Menurut Brigham dan Houston (2006), manajer perusahaan umumnya bertindak untuk memaksimalkan ukuran dari perusahaan karena dengan meningkatkan ukuran perusahaan, maka para manajer dapat meningkatkan keamanan jabatan, kekuatan, status dan gaji mereka. Dampak yang timbul dari keadaan ini adalah turunnya nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur berdasarkan persamaan yang digunakan oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) yaitu :

$$SIZE = \ln \text{ Total Aktiva} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Size = Ukuran Perusahaan

$\ln$ Total Aktiva = Natural Logaritma dari total aktiva yang dimiliki perusahaan

Penghitungan ukuran perusahaan menggunakan natural logaritma total aktiva karena apabila menggunakan total aktiva maka jumlahnya terlalu besar, sehingga natural logaritma digunakan untuk memperkecil dari jumlah total aktiva tersebut (Miswanto dan Husnan dalam Riyanto, 2002). Penggunaan total aktiva sebagai pendekatan terhadap ukuran perusahaan dilandasi pemikiran bahwa total aktiva merupakan kekayaan perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menurut Rahmawati dan Triatmoko (2007), perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

2.1.5 *Good Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Berghe dan Rider dalam Kakabadse *et al.* (2001) menyatakan hubungan kinerja perusahaan dengan *corporate governance* tidak mudah dilakukan. Hasil penelitian Deni *et al.* (2004) dengan sampel perusahaan publik di Indonesia yang masuk pemeringkatan penerapan *corporate governance*, menemukan hasil bahwa *corporate governance* baru bisa memiliki keterkaitan dengan kinerja operasi perusahaan diukur dengan rasio *return on equity*, sedangkan keterkaitan terhadap kinerja pasar tidak ditemukan. Hal ini disebabkan respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak bisa secara langsung direspon tetapi membutuhkan waktu atau ada kemungkinan masih rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap efektivitas pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia. Penelitian dengan hasil yang sama dikemukakan oleh Lastanti (2005) dan Majidah (2005).

Menurut Cornett *et al.* (2009) kinerja perusahaan dan mekanisme *corporate governance* merupakan upaya yang berkaitan (mendukung). Brown and Caylor (2006) menyatakan penilaian *Governance* signifikan dan positif dengan Kinerja perusahaan (*Tobin's Q*). Hal senada dilakukan oleh Black *et al.* (2005); Klapper dan Love (2002) yang memberikan bukti bahwa *corporate governance* merupakan faktor penting dalam menjalankan kinerja perusahaan.

IICG (2009) melakukan beberapa kajian yang mengevaluasi hubungan antara penerapan GCG dengan kinerja perusahaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, menunjukkan hasil temuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Beberapa kajian yang menyebutkan ada

hubungan positif, yang berarti semakin baik penerapan GCG akan semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut, sedangkan yang menyebutkan tidak ada hubungan, karena perusahaan mengasumsikan bahwa dampak penerapan GCG memerlukan waktu lebih lama agar dapat melihat dampak kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disepakati bahwa dampak GCG terhadap kinerja keuangan akan bersifat positif dalam waktu singkat atau memerlukan waktu beberapa tahun mendatang. IICG (2009) hasil riset dan pemeringkatan CGPI 2008, hubungan antara skor praktek peserta CGPI 2008 dengan kinerja keuangan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan GCG dengan kinerja keuangan.

Penelitian ini menghipotesiskan penilaian pelaksanaan GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Implementasi GCG dengan baik pada perusahaan akan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Dampak dari penerapan aktivitas GCG yang baik, perusahaan akan mendapatkan penilaian pelaksanaan GCG oleh IICG semakin baik. Berdasarkan pada *grand theory* yaitu *agency theory*, maka perusahaan membuat kontrak kerja antara pemilik modal (*principal*) dengan manajer perusahaan (*agent*). Teori pendukung yang relevan dengan GCG dengan kinerja perusahaan yaitu teori pemangku kepentingan (*stakeholders theory*) berpendapat bahwa perusahaan melayani tujuan publik yang lebih luas, yaitu menciptakan nilai bagi masyarakat. Perusahaan harus menghasilkan laba bagi pemiliknya, jika tidak menghasilkan laba maka perusahaan tersebut tidak dapat bertahan hidup. Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kembalian (*return*) bagi pemegang saham.

2.1.7 Hubungan Ukuran Perusahaan dan Kinerja Perusahaan

Soliha dan Taswan (2002) menyatakan bahwa perusahaan besar dapat dengan mudah mengakses ke pasar modal. Kemudahan untuk mengakses ke pasar modal berarti perusahaan

memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana, karena kemudahan akses fleksibilitas ke pasar modal cukup berarti fleksibilitas dan kemampuannya untuk memunculkan dana lebih besar. Dengan kemudahan tersebut ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik, sehingga ukuran perusahaan yang besar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sujoko dan Soebiantoro (2007) yang menyatakan bahwa investor mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam membeli saham. Ukuran perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Sejalan dengan Makaryanawati (2003) yang menyatakan bahwa investor merespon positif atau memberikan preferensi terhadap perusahaan yang memiliki nilai buku total aktiva yang besar. Investor berasumsi bahwa dengan nilai buku total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu membiayai kegiatan operasional perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal.

Menurut Chichello (2005) pada penelitiannya menggunakan *OLS regresi*, pengukuran ukuran perusahaan menggunakan total aktiva akan mempunyai dampak terhadap kinerja perusahaan pada tingkat signifikansi 10%, meskipun mempunyai pengaruh negatif. Harjito dan Nurfauziah (2006), perusahaan yang besar cenderung mendiversifikasikan asetnya, sehingga dapat menurunkan prestasi perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Menurut Sugiarto (2009), kebijakan pada perusahaan besar cenderung dipengaruhi oleh banyak intervensi dari pemerintah, sehingga tidak disukai oleh investor yang mengakibatkan nilai perusahaan menurun.

Penelitian ini menghipotesiskan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai oleh investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik, sehingga ukuran perusahaan yang besar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini berdasarkan teori akuntansi positif yang menghipotesiskan biaya politik. Perusahaan yang memiliki aset besar diasumsi memiliki banyak ikatan kontrak, masing-masing kontrak tersebut memiliki derajat pengikatan terhadap perusahaan dan berdampak terhadap biaya politik yang ditanggung. Biaya politik ini dapat berkaitan dengan transfer kesejahteraan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan aset yang besar menyediakan garansi yang lebih baik dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada pihak lain. Selain itu perusahaan yang lebih memiliki aset yang besar dianggap lebih dewasa, stabil dan berpengalaman sehingga menghasilkan pendapatan yang positif lebih dapat dipercaya.

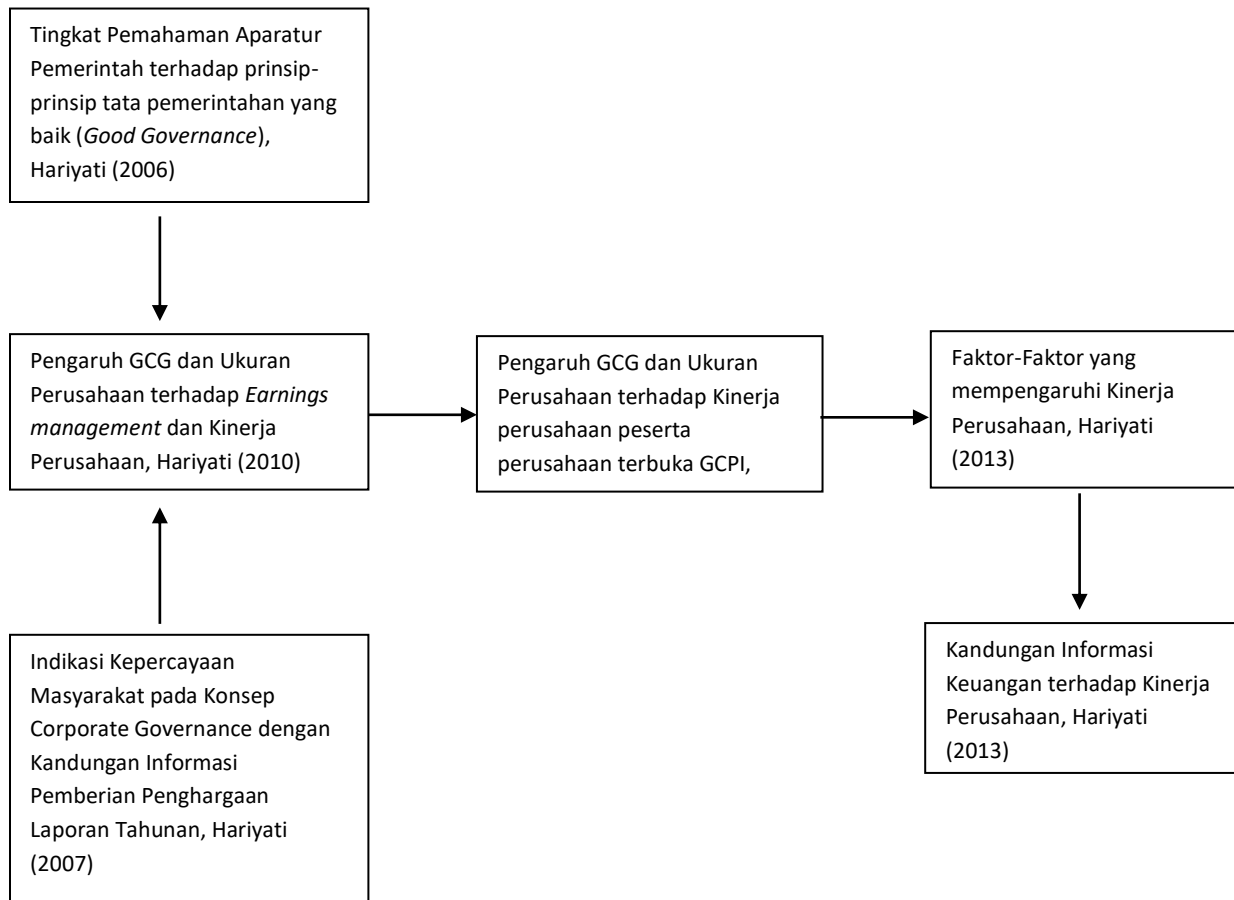
2.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis:

1. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap *earnings management*.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan

2.3 Roadmap Penelitian



BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Studi

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

3.2 Manfaat Studi

Berdasarkan uraian latar belakang, judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu akuntansi khususnya mengenai, *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan.
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang terkait dengan perkembangan *agency theory* dalam pencapaian kinerja perusahaan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan pencapaian kinerja perusahaan dilihat dari ukuran perusahaan.
- c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang terkait dengan perkembangan akuntansi positif (*positive accounting theory*) khususnya tentang ukuran perusahaan.

3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemilik, pengawas dan pengelola perusahaan dalam aktivitas *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan secara optimal untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat peraturan di pasar modal, lembaga-lembaga yang berwenang untuk merumuskan peraturan yang mengarah pada terciptanya pasar modal yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance*, dan ukuran perusahaan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif dalam perusahaan dan mengantisipasi masalah agensi, sehingga informasi keuangan yang disajikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang dipercaya.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Setelah mempelajari berbagai referensi tentang metode penelitian, ternyata penelitian itu menunjukkan berbagai ragam desain penelitian, tergantung sudut pandang masing-masing. Penyebutan untuk jenis desain penelitian itu ada yang dilihat dari segi tujuan, pendekatan, keilmuan, kegunaan, sumber data dan sebagainya. Selltiz, *et al.* (1964) dalam Nazir, (2003:88) membagi desain penelitian atas tiga, yaitu: (1) desain untuk studi *eksploratif* dan *formulatif*; (2) desain untuk studi *deskriptif*, dan ; (3) desain untuk studi menguji hipotesis.

Pilihan dalam penelitian ini termasuk ke dalam desain penelitian ketiga: desain untuk menguji hipotesis kausal. Jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan/ menerangkan tentang hubungan kausalitas antar variabel satu dengan lainnya. Hal ini sering disebut penelitian ekplanatori (*explanatory research*) yakni penelitian untuk menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis kausalitas di atas, digunakan pendekatan metode *kuantitatif* dengan menggunakan Analisis Regesi. Hasil olahan analisis regresi dideskripsikan berdasarkan *konsep teoritis* dan *data empiris* yang menjelaskan peran keterkaitan antar variabel *eksogen* dengan variabel *endogen*.

4.2 Populasi

Populasi (*Population*) menurut Sekaran (2003) dalam Hermawan (2006:143) Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti. Menurut Sugiyono (2003:55) Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Pemilihan populasi pada penelitian ini dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Perseroan Terbuka sebagai peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2004 - 2008.
2. Terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Ghazali (2005) data sekunder adalah data dan informasi pendukung yang diperoleh dan sudah diolah oleh pihak lain. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Pada penelitian ini informasi penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperoleh dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Informasi data keuangan untuk mengetahui ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan dapat diperoleh dari BEI dan ICMD.

3.4 Variabel Penelitian

4.4.1 Klasifikasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau memiliki bermacam-macam nilai atau segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian (Sugiono, 2005:2). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lima variabel terukur dari penilaian pelaksanaan GCG (*self assessment*, kelengkapan dokumen, membuat makalah dan presentasi, observasi ke perusahaan) sebagai variabel penyebab (eksogen) yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Kinerja perusahaan sebagai variabel akibat (endogen) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lain.

4.4.2 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi variabel di atas, maka berikut ini dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel yang akan diteliti, sebagai berikut:

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance sebagai variabel eksogen (X1) merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, *shareholders* dan non pemegang saham. Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* diukur dengan *index GCG system* yang dikeluarkan oleh IICG tahun 2004-2008 hanya pada perusahaan terbuka. Penilaian *index GCG system* mencakup (1) *self assessment* dengan nilai 15% (persen), (2) kelengkapan dokumen dengan nilai 25 % (persen), (3) makalah dan presentasi dengan nilai 12% (persen) dan (4) observasi perusahaan dengan nilai 48% (persen).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan, sebagai variabel eksogen (X2), merupakan besar kecilnya perusahaan tercermin dari nilai keseluruhan aktiva perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran yang digunakan adalah logaritma natural dari seluruh aset perusahaan. Pada penelitian ini untuk menghitung ukuran perusahaan menggunakan data *cross-section* dan *time series* pada perusahaan *go public* tahun 2004-2008 yang ikut perbandingan CGPI.

Kinerja perusahaan

Kinerja perusahaan sebagai variabel endogen (Y1) merupakan hasil kerja yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Pada penelitian ini untuk menghitung kinerja perusahaan menggunakan data *cross-section* dan *time series* pada perusahaan *go public* tahun 2004-2008. Pengukuran kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan *Tobin's Q* sebagai pengukuran kinerja dari sisi eksternal. *Tobin's Q* sering digunakan sebagai *proxy* dalam menilai kualitas

perusahaan atau *corporate opportunity*. Pada penelitian ini untuk menghitung kinerja perusahaan menggunakan data *cross-section* dan *time series* pada perusahaan *go public* tahun 2004-2008 yang ikut perangkian CGPI.

Tobin's Q dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$Q = (EMV + D) / (EBV + D)$$

Keterangan:

Q = Nilai Perusahaan

EMV = Nilai pasar ekuitas (*Equity market value*)

D = Nilai buku dari total hutang

EBV = Nilai buku dari total aktiva (*Equity book value*)

Equity Market Value (EMV) diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan (*Closing Prices*) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. Nilai *Tobin's Q* antara 0-1 menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut *undervalued*; nilai 1 menunjukkan bahwa *market value* merefleksikan nilai *asset* perusahaan sedangkan jika *Tobin's Q* > 1 menunjukkan bahwa *market value* lebih besar dari nilai perusahaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa *market value* merefleksikan *asset* yang tidak dapat diukur (*intangible value*) dari perusahaan seperti reputasi, atau inovasi yang merupakan nilai yang diberikan oleh para pemegang saham ataupun analisis-bisnis perusahaan.

4.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan pertimbangan waktu dan biaya, maka pengambilan data empiris hanya periode lima tahun (2004-2008). Penelitian ini juga mempertimbangkan bahwa pada

periode tahun pengamatan IIGC melakukan hasil perangkingan yang terakhir tahun 2008, sehingga penelitian ini mengambil data 5 tahun terakhir (2004-2008).

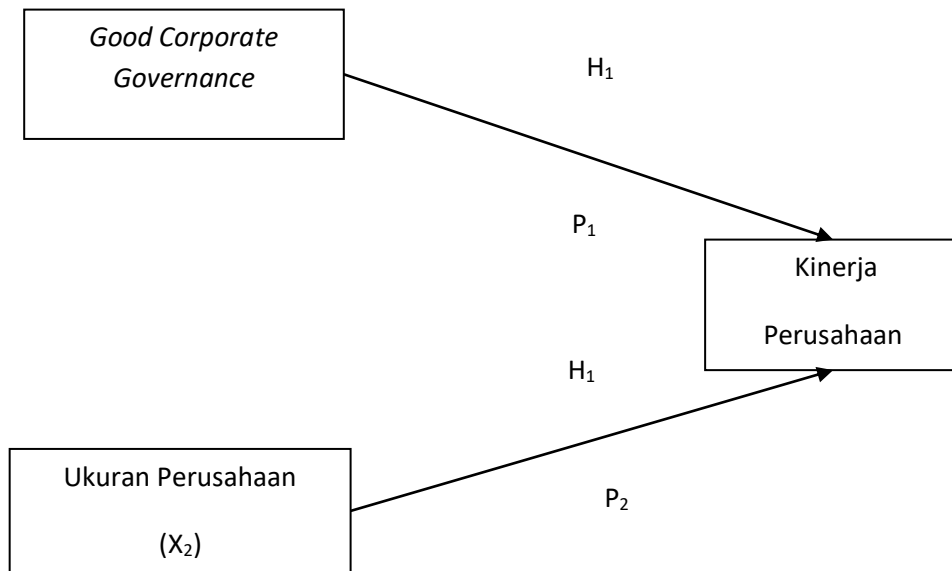
4.6 Prosedur Pengambilan Data

Data diambil melalui internet pada situs Bursa Efek Indonesia dengan alamat <http://www.jsx.co.id>. Sedangkan data yang lain diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*, hasil perangkingan IICG. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang ikut dalam perangkingan yang dilakukan IICG selama lima tahun terakhir. Data yang dipakai berupa gabungan data *cross sectional* dan data *time series (pool data/panel data)*.

4.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif yaitu untuk melihat gambaran karakteristik sampel yang terjaring dalam penelitian ini dan analisis regresi digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel penyebab (*eksogen*) terhadap satu set variabel akibat (*endogen*). Dalam penelitian ini yang digunakan dalam operasional data adalah program *Statistical Package for Sosial Science (SPSS)*. Program ini banyak dipakai untuk mengolah model-model penelitian yang multidimensi dan sering digunakan untuk menguji model hipotesis.

Hubungan antara variabel dapat dilihat pada **Gambar 3.1** sebagai berikut:



Gambar 4.1 HUBUNGAN ANTAR VARIABEL PENELITIAN

Model tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yang terdiri dari persamaan untuk kinerja perusahaan, yaitu sebagai berikut:

$$1. Y_1 = p_1x_1 + p_2x_2 + \epsilon$$

Keterangan:

X_1 : *Good Corporate Governance*

X_2 : Ukuran Perusahaan

Y_1 = Kinerja Perusahaan

p_1 & p_2 = Koefisien jalur

ϵ = Residual (*error term*)

4.7.1 Analisis dan Pengujian

4.7.1.1 Asumsi Rekursif

Asumsi rekursif mempersyaratkan bahwa hubungan antar variabel eksogen saling bebas. Uji asumsi apakah model memenuhi model rekursif atau tidak pada studi ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hubungan antar variabel ekogen saling bebas jika nilai VIF tidak lebih dari 10 (Algifari, 1997: 74).

4.7.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linear melihat ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi pada variabel endogen *earnings management* menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,184. Syarat tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif adalah $dl < DW < 4 - du$.

4.7.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan Uji statistik non - parametrik Kolmogorov – Smirnov (K- S). Pada variabel GCG besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 1,359 dan signifikan pada 0,050 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel ukuran perusahaan besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 0,626 dan signifikan pada 0,829 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel *earnings management* besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 1,091 dan signifikan pada 0,185 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel kinerja perusahaan besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 0,356 dan signifikan pada 0,051 hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

4.7.1.4 Uji Linearitas

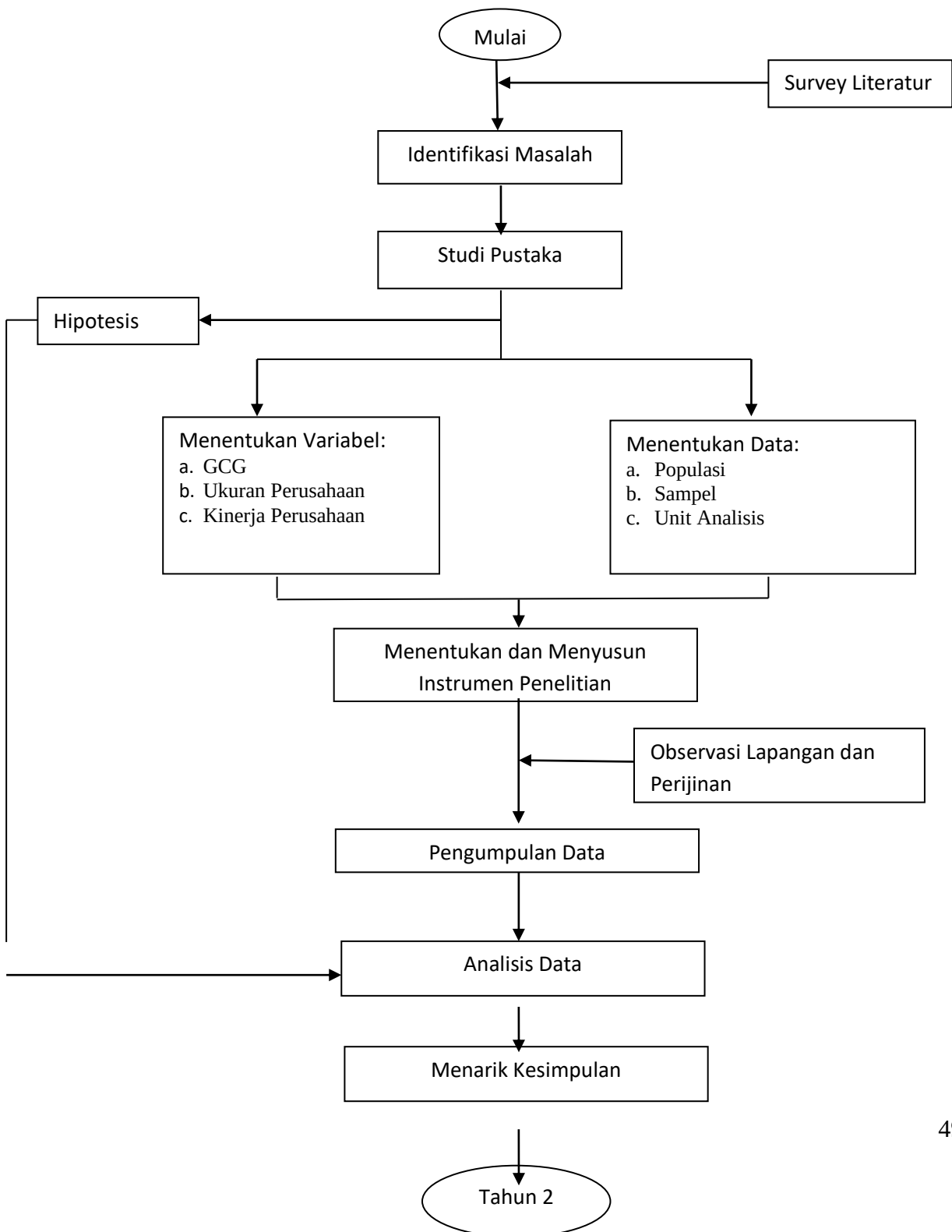
Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan *Ramsey Test*. *Ramsey Test* menyarankan suatu uji yang disebut *general test of specification* atau RESET. Syarat fungsi linear diterima dengan syarat $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$. $F \text{ hitung}$ dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}})/m}{(1 - R^2_{\text{new}})/(n - k)}$$

4.8 Bagan Alir penelitian

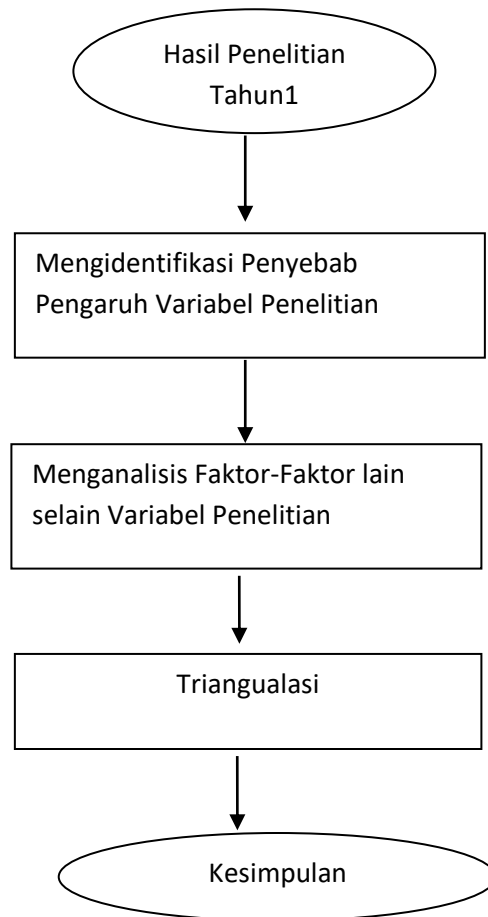
Bagan Alir Penelitian Tahun 1:

Melihat pengaruh GCG dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja perusahaan menggunakan Statistik



Bagan Alir Penelitian Tahun 2:

Menganalisis penyebab GCG dan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh/tidak terhadap Kinerja Perusahaan



BAB V HASIL YANG DICAPAI

Pada **Tabel 5.1** berikut ini merupakan jumlah peserta CGPI 2004-2008:

Tabel 5.1
Jumlah Populasi Peserta CGPI di Indonesia Tahun 2004-2008

No.	Perseroan Terbuka	Tahun	Jumlah
1.	PT. Bank Mandiri, (persero), Tbk.	2008, 2006, 2005	3
2.	PT. Telekomunikasi, (persero), Tbk.	2008, 2005	2
3.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	2008, 2006, 2005, 2004	4
4.	PT. Aneka Tambang, Tbk.	2008, 2007, 2006, 2005,	4
5.	PT. United Tractors, Tbk.	2008, 2007, 2006, 2005	4
6.	PT. Tambang Bukit Asam (persero), Tbk.	2008, 2007, 2006, 2005	4
7.	PT. Elnusa, Tbk.	2008, 2007	2
8.	PT. BNI (persero), Tbk.	2008, 2006, 2005	3
9.	PT. Jasa Marga (persero) Tbk.	2008	1
10.	PT. Adi Karya (persero) Tbk.	2008, 2006,	2
11.	PT. Bakrieland Development, Tbk.	2008, 2007	2
12.	PT. Bumi Resources, Tbk	2008	1
13.	PT. Panorama Tbk.	2008, 2007, 2006	3
14.	PT. Adi Karya (persero) Tbk.	2007	1
15.	PT. Indosat, Tbk.	2007, 2006, 2005	3
16.	PT. Bank NISP, Tbk.	2007	1
17.	PT. Wijaya Karya, Tbk.	2007	1
18.	PT. BFI Finance Indonesia , Tbk.	2007, 2005, 2004	3
19.	PT. Citra Marga Nusapala, Tbk.	2007, 2006	2
20.	PT. Bank Permata, Tbk.	2006, 2005, 2004	3
21.	PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk.	2006, 2005	2
22.	PT. Bakrie & Brothers, Tbk.	2006, 2005	2
23.	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	2006, 2005	2
24.	PT. Medco Energi International, Tbk.	2005	1
25.	PT. Astra International, Tbk.	2005, 2004	2
26.	PT. Kalbe Farma, Tbk.	2006, 2005	2
27.	PT. Astra Graphia, Tbk.	2006, 2005, 2004	3
28.	PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk.	2005, 2004	2
29.	PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk.	2005	1
30.	PT. Trimegah Sekurities, Tbk.	2005	1
31.	PT. Bank Central Asia, Tbk.	2004	1
32.	PT. Dankos, Tbk.	2004	1
33.	PT. Astra Agro Lestari, Tbk.	2004	1
JUMLAH			69

Sumber : IIGC 2005-2009

Data penelitian yang diolah berasal dari laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2008 dan data yang dikeluarkan oleh IICG untuk CGPI Tahun 2004 -2008 mengenai penilaian perangkian pelaksanaan GCG. Penelitian ini menggunakan gabungan data *cros sectional* dan data time series (pool data/ panel data) selama 5 tahun. Data dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka dan terdaftar dalam peserta CGPI tahun 2004 – 2008 sebanyak 69 data observasian. Analisis statistik deskriptif hasil penelitian ditampilkan dalam **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2
STATISTIK DESKRIPTIF

	GCG	SIZ	KJP
Maximum	90,65	19,7	1,88
Minimum	56,38	9,59	0,4
Mean	78,5714	15,8624	1,1331
Std. Deviasi	7.55566	2,03135	0,32910
Kolmogorov-Smirnov Z	1,359	0,626	1,356
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,50	0,829	0,51

Sumber: Data diolah

Keterangan:

GCG = *Good Corporate Governance*

SIZ = Ukuran Perusahaan

EM = *Earnings Management*

KP = Kinerja Perusahaan

5.1 Deskriptif Variabel

5.1.1 *Good Corporate Governance*

Variabel *Good Corporate Governance* berdasarkan *index* GCG yang dilakukan oleh IICG. Index GCG terdiri penilaian *self assessment*, kelengkapan dokumen, makalah dan presentasi dan observasi perusahaan. Data diperoleh dari IICG untuk CGPI pada periode 2004-2008, hanya pada perusahaan publik. Berdasarkan **Tabel 5.1** menunjukkan sebaran kisaran angka data antara 90,65 dan 56,38 dengan angka rata-rata (*mean*) 78,5714.

5.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan jumlah *log natural asset* perusahaan. Data diperoleh dari BEI yang merupakan perusahaan publik yang ikut dalam perangkingan IICG pada periode 2004-2008. Berdasarkan **Tabel 5.1** menunjukkan sebaran kisaran angka data antara 19,7 dan 9,59 dengan angka rata-rata (*mean*) 2,03135

5.1.3 Kinerja Perusahaan

Variabel kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan *Tobin's Q* sebagai pengukuran kinerja dari sisi eksternal. Data diperoleh dari BEI yang merupakan perusahaan publik yang ikut dalam perangkingan IICG pada periode 2004-2008. Berdasarkan **Tabel 5.1** menunjukkan sebaran kisaran angka data antara 1,88 dan 0,4 dengan angka rata-rata (*mean*) 1,1331.

5.2 Analisis dan Hasil Pengujian

5.2.1 Asumsi Rekursif

Asumsi rekursif mempersyaratkan bahwa hubungan antar variabel eksogen saling bebas. Uji asumsi apakah model memenuhi model rekursif atau tidak pada studi ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hubungan antar variabel ekogen saling bebas jika nilai VIF tidak lebih dari 10 (Algifari, 1997: 74).

Hasil pengujian asumsi rekursif seperti ditunjukkan pada **Tabel 5.2** dan **Tabel 5.3** menunjukkan bahwa VIF tidak lebih besar dari 10, oleh karena itu hasil uji model ini memenuhi asumsi model rekursif. Dapat disimpulkan bahwa model ini tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5.3
UJI ASUMSI REKURSIF PADA VARIABEL ENDOGEN
KINERJA PERUSAHAAN

Variabel Eksogen	VIF	Kesimpulan
<i>Good Corporate Governance</i>	1,305	Tidak ada hubungan (saling bebas)
Ukuran Perusahaan	1,338	Tidak ada hubungan (saling bebas)
<i>Earning Management</i>	1,605	Tidak ada hubungan (saling bebas)

Sumber: Data diolah

5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linear melihat ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi pada variabel endogen *earnings management* menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,184. Nilai Tabel *Durbin Watson* (DW) dengan jumlah n= 69

dan variabel independen 2 ($k=2$) dl sebesar 1,554 du sebesar 1,672. Syarat tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif adalah $dl < DW < 4 - du$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan $1,554 < 2,184 < 2,328$. Jadi dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

Uji autokorelasi pada variabel endogen kinerja perusahaan menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,312. Nilai Tabel *Durbin Watson* (DW) dengan jumlah $n=69$ dan variabel independen 2 ($k=2$) maka dl sebesar 1,554 du sebesar 1,672. Syarat tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif adalah $dl < DW < 4 - du$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan $1,554 < 2,312 < 2,328$. Jadi dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

5.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan Uji statistik non - parametrik Kolmogorov – Smirnov (K- S). Pada variabel GCG besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 1,359 dan signifikan pada 0,050 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel ukuran perusahaan besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 0,626 dan signifikan pada 0,829 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Pada variabel kinerja perusahaan besarnya nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 0,356 dan signifikan pada 0,051 hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

5.2.4 Uji Linearitas

Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan *Ramsey Test*. *Ramsey Test* menyarankan suatu uji yang disebut *general test of specification* atau RESET. Syarat fungsi linear diterima dengan syarat $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$. $F \text{ hitung}$ dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}})/m}{(1 - R^2_{\text{new}})/(n - k)}$$

$$F = \frac{0,598 - 0,377/1}{(1 - 0,598)(69 - 4)}$$

$$F = 0,00846$$

Hasil uji linieritas menunjukkan bahwa $F_{\text{hitung}} (0,00846) < F_{\text{tabel}} (4,73)$, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah model linear.

5.3. Analisis Regresi

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi SPSS. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan antara $p\text{-value}$ dengan α ($alpha$) yang ditentukan oleh peneliti. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan bahwa variabel endogen kinerja perusahaan (Y_2) dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel eksogen *Good Corporate Governance* (X_1), ukuran perusahaan (X_2), dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel eksogen *Good Corporate Governance* (X_1), ukuran perusahaan (X_2), yang diinterpretasikan dari masing-masing koefisien jalur. Model persamaan yang diajukan dalam studi ini masing-masing dikemukakan secara ringkas pada **Tabel 5.4**

Tabel 5.4
PENGUJIAN KOEFISIEN JALUR

Variabel Eksogen	Variabel Endogen	Koefisien Estimasi	t-statistik	<i>p-value</i>	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i> (X ₁)	Kinerja Perusahaan (Y ₂)	0,362	4,029	0,000	Signifikan
Ukuran Perusahaan (X ₂)	Kinerja Perusahaan (Y ₂)	0,376	4,136	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah

BAB VI

RENCANA BERIKUNYA

Rencana berikutnya adalah: Menganalisis hasil data yang diolah dengan grand teori dan teori pendukung yang lain yaitu teori agensi dan teori akuntansi positif. Grand teori yang dipergunakan dianalisis dengan hasil data, apakah hasilnya mendukung teori atau menolak.

Menganalisis hasil temuan dengan hasil mendukung penelitian terdahulu atau menolak penelitian sebelumnya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, mempunyai arah hubungan positif. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, mempunyai arah hubungan positif. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan penelitian Deni *et al.* (2004), Lastanti (2005), Majidah (2005), Cornett *et al.* (2009), Brown and Caylor (2006) menyatakan penilaian *Governance* signifikan dan positif dengan Kinerja perusahaan (*Tobin's Q*). Hal senada dilakukan oleh Black *et al.* (2005); Klapper dan Love (2002) yang memberikan bukti bahwa *corporate governance* merupakan faktor penting dalam menjalankan kinerja perusahaan.

Penelitian ini mendukung Soliha dan Taswan (2002), Sujoko dan Soebiantoro (2007), Menurut Chichello (2005), menyatakan bahwa perusahaan besar dapat dengan mudah mengakses ke pasar modal. Kemudahan untuk mengakses ke pasar modal berarti perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana, karena kemudahan akses fleksibilitas ke pasar modal cukup berarti fleksibilitas dan kemampuannya untuk memunculkan dana lebih besar. Dengan kemudahan tersebut ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik, sehingga ukuran perusahaan yang besar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini mendukung *agency theory* dengan penelitian ini, penerapan GCG dapat mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan. Peningkatan GCG dapat mengurangi tindakan *earnings management*. *earnings management* adalah suatu tindakan yang dilakukan manajer yang diakibatkan adanya masalah agensi antara *principals* dan *agents*. Teori keagenan untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan antara *principals* dan *agents*, salah satunya dengan melalui pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). *Good Corporate*

Governance berpegang pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, mandiri dan kewajaran. Mekanisme *Good Corporate Governance* dapat meminimalisir adanya masalah agensi. Penelitian ini mendukung Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) yaitu menjelaskan dan menguraikan praktek akuntansi tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dapat diuji dengan dunia empiris sehingga lebih berhasil menyelesaikan masalah praktek akuntansi. Teori akuntansi menyediakan seperangkat prinsip atau konsep-konsep yang luas untuk memberikan jawaban terhadap praktek akuntansi yang berlaku dan memprediksikan/ meramalkan fenomena-fenomena yang berlaku.

7.2 Saran

Membuat regulasi untuk peningkatan penerapan GCG pada perusahaan supaya meningkatkan kinerja perusahaan. Alasan membuat regulasi supaya perusahaan dapat tumbuh menjadi besar karena dengan meningkatnya aktiva perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini karena ada korelasi antara persepsi mengenai mutu *corporate governance* perusahaan-perusahaan di sebuah negara dan besarnya *premium* yang dibayar oleh para investor bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik. Semakin baik persepsi *corporate governance* di sebuah negara, semakin tinggi pula *premium* yang dapat mereka berikan kepada perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alwan, Sri Kustono, 2009, Pengaruh Ukuran, Devidend Payout, Risiko Spesifik, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur Studi Empiris Bursa Efek Jakarta 2002–2006, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 14 Nomer 3, pp. 200 – 203.

- Assih, Prihat, Parawiyati, Ambar Woro, 2005, Pengaruh Manajemen Laba pada Nilai dan Kinerja Perusahaan Periode Penawaran Publik Perdana, *Konferensi Nasional Akuntansi*, pp. 1-18.
- Atkins, M. and John F. Lowe, 1997, Sizing Up the Small Firm: UK and Australian Experience, *International Small Business Journal*, 15 (3), pp. 42-55.
- Atkinson, Anthony A., 1995, *Management Accounting*. Second Edition, Phillipines. Prentice Hill, Richard D Irwin, Inc.
- Axtell, R., 2006, Firm Sizes: Facts, Formulae, Fables, and Fantasies, *Working Paper*, No. 44, CSED Washington, The Brookings Institution.
- Ball, R and P. Brown, 1968, An Empirical Evaluation of Accounting Income Number, *Journal of Accounting Research*, Vol. 6. pp. 159-178.
- Bandi dan Jogiyanto Hartono, 2000, Perilaku Reaksi Harga dan Volume Perdagangan Saham terhadap Pengumuman Deviden, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.3, No. 2, Hal 203-213.
- Barton, J.J., and P.J. Simko, 2002, The Balance Sheet as an Earnings Management Constraint, *Accounting Review*, Vol. 77. pp. 1-27.
- Bateman, Thomas S. and Carl P. Zeithmal. 1990. *Management Function and Strategy*. USA. Richard D. Irwin, Inc.
- Beattie, R.P. and E. Zajac. 1994. Managerial Incentives Monitoring and Risk Bearing: A Study Executive Compensation, Ownership and Board Structure in Initial Public Offering. *Administratives Science Quarterly*. Vol. 39. pp. 313-335.
- Beaver, William H. 1968. The Information Content of Annual Earnings Announcements. *Journal of Accounting Research*. Supplement. pp. 67-92.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and review. *Academy of Management*. Vol. 14. No. 1, pp. 57-74.
- Fama, Eugene F. 1980. Agency problem and the Theory of the firm. *Journal of Political Economy*. Vol. 88, No.2 (April). pp. 288-307.
- _____. dan Jensen, M. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*. Vol. 36. pp.301-325.
- _____. 1983. Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Political Economic*, Vol. 26, pp. 327-350.
- FCGI (Forum For Corporate Governance In Indonesia). 2002. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan*

- Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Jakarta. Yayasan Pendidikan pasar Modal Indonesia & Synergy Communication.
- Ghozali, Imam, 2005, *Analisis Multivariate dengan Proses SPSS*, BP. UNDIP, Semarang.
- Hunt, A. S.E. Moyer and T. Shevlin, 1995, Earnings Volatility, Earnings Management and Equity Value, Seattle WA, *Working Paper*, University of Washington.
- Healy, P.M. 1995. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, *Journal of Accounting and Economic*. pp. 85-107.
- _____, and J.M. Wahlen. 1998. A Review of the earnings management Literature and its Implication for Standard Setting. *Working Paper*.
- IAI-KAP, 2001, Standard Profesional Akuntan Publik. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*). 2000. *Corporate Governance atau Corporate Failure?*
- _____. 2005. Laporan Hasil Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index 2004. Internalisasi *Good Corporate Governance* dalam Proses Bisnis.
- _____. 2006. Laporan Hasil Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index 2005. Mewujudkan *Good Corporate Governance* sebagai Sebuah Sistem.
- _____. 2007. Laporan Hasil Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index 2006. Menyempurnakan *Good Corporate Governance* sebagai Sebuah Sistem.
- _____. 2008. Laporan Hasil Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index 2007. Aktualisasi *Good Corporate Governance* sebagai Sebuah Sistem.
- _____. 2009. Laporan Hasil Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index 2008. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Manajemen Strategik.
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta, Salemba Empat.
- Jeffrey A. Alexander and Bryan Weiner. 1998. *Good Corporate Governance*. Boston. Prentice-Hall International.

- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, pp. 305-360.
- _____. 1993. The Industrial Revolution, Exit, and The Failure of Internal Control System. *Journal of Finance*. Vol. 48. July. pp. 831 – 880.
- _____ and R. Ruback. 1983. The market for Corporate Control: The scientific evidence. *Journal of Financial Economic*. Vol. 11, pp. 5 -50.
- Jin, Liauw S. dan M. Machfoedz. 1998. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Penghasilan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 1 (2). pp. 174-191.
- Kanagaretnam Kiridaran, Gerald J. Lobo and Dennis J. Whalen. 2007. Does good corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earnings announcements?. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 26. pp. 497–522.
- Klapper, Leora F. and I. Love. 2002. Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Market. *World Bank Working Paper*. <http://ssrn.com>. diakses tanggal 30 Agustus 2008.
- Klein A. 2002a, Audit committee, Board of Directors Characteristic, and Earnings management, *Journal of Accounting and Economic*, Vol. 32. pp. 375-400.
- KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance). 2001. Pedoman *Good Corporate Governance* ref. 4.0
- Laing, David and Charles, 1999, Governance Structures, Size and Corporate Performance UK Firms, *Management Direction*, London, Iss.5. p. 457.
- La Porta R., F. Lopez-de-Shleifer., R. Vishny. 1999. Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*. Vol. 54. pp. 471-518.
- _____. 2000. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*. Vol. 58. pp 3-27.
- Lako, Andreas. 2003. Anomali Reaksi investor terhadap Pengumuman Laba Goods News: Bukti empiris dari Bursa Efek Jakarta. *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 002/Th. XXXII. Februari. pp. 3-12.
- Liu, Qiao and Zhou (Joe) Lu. 2007. Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 13. pp. 881–906.

- Majidah. 2005. Hubungan Kausalitas Mekanisme dan Proses Tata Kelola Perusahaan serta Kinerja Keuangan (Suatu Studi Emiten di Bursa Efek Jakarta). *Konferensi Nasional Akuntansi*.
- Marrakchi S., Chtourou. Corporate Governance and Earning Management. 2001. Social Science Research Network (SSRN), <http://paper.ssrn.com/abstract=275053>. diakses tanggal 5 April 2009.
- Medoff, J dan K., Abraham. 1980. Experience, Performance, and Earning. *Quartely Journal of Economics*. Vol. 4. pp. 703-736.
- Milton, T., 2002, A Cross-Firm Analisis of the Impact of corporate governance on the East Asian Financial Crisis, *Journal of Financial Economic*, pp. 1-45.
- Moses, Douglas O. 1997. Income Smoothing and Incentives: Empirical Using Accounting Changes. *The Accounting Review*. Vol. LXII, No.2. April. pp. 259-377.
- _____. 1987. Income Smoothing and Incentives: Empirical Test Using Accounting Changes, *The Accounting Review*. Vol. 62 (2). pp. 358-377.
- Nicolo, Gianni De, Luc Laeven, and Kenichi Ueda. 2008. Corporate governance quality: Trends and real effects. *Journal of Financial Intermediation*. Vol. 17. pp. 198–228.
- OECD. 2004. *Principles of Corporate Governance*. Paris, France.OECD Publication Services.
- Presiden Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.
- Richardson, V. J., 1998, Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence. <http://www.ssrn.com>, diakses tanggal 20 Nopember 2009.
- Scott, William R., 2000, *Financial Accounting Theory*, Second edition. Canada: Prentice Hall.
- _____, 2006, *Financial Accounting Theory*, Fourth edition. Canada: Prentice Hall.
- Soliha, Euis dan Taswan. 2002. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Serta Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Bisnis Ekonomi*. (online), <http://www.google.co.id> diakses 21 Oktober 2008.
- Sylvia Veronica Siregar and Sidharta Utama. 2008. Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*. Vol. 43. pp. 1–27.
- Veronica N.P Siregar, Sylvia dan Siddharta Utama. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba. *Kumpulan Makalah*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Ikatan Akuntan Indonesia.

Veronica, Sylvia dan Y.S. Bachtiar. 2003. Hubungan antara manajemen Laba dengan Tingkat Pengungkapan Laporan keuangan. Surabaya. *Kumpulan Makalah*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Ikatan Akuntan Indonesia.

Watts and Zimmerman, 1986, *Positive Accounting Theory*. *The Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

_____, 1990, Positive Accounting Theory: a Ten Years Perspective. *The Accounting Review*. Vol.65. No.1, January.